

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERNIAGAAN
SATWA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : Rezyana Pinkan S

Nim : 16.02.51.0023

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2021

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya RE ZYANA PINKAN S, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERNIAGAAN SATWA DILINDUNGI UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSEP UASAI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

REZYANA PINKAN S
16.02.51.0023

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir
Semarang, 04 Februari 2021

ROCHMANI. SH M .HUM
Pembimb'ing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik.
Disertai QRCode untuk validasi.

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR DENGAN JUDUL
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERNIAGAAN
SATWA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA**

Ditulis Oleh :

Nama : Rezyana Pinkan S

Nim : 16.02.51.0023

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata I Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 22 Ferbuari 2021

Ketua



(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIDN : 0618126401

Sekretaris



(Dr. Saiful Faozi, S.H., M.Hum)

NIDN : 0625096501

Anggota



(Wenny Megawati S.H., M.H)

NIDN : 0623079101

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIDN : 0618126401

HALAMAN MOTTO

Hidup adalah perjuangan dengan serangkaian tujuan yang harus diraih

Kerja cari uang, semangat!

-Rezyana Pinkan S-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Mamah dan Papah saya yang tidak pernah lelah memberi nasihat dan saran, yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal, mencurahkan segala usaha untuk saya, serta memberikan kepercayaan kepada saya untuk memilih jalan hidup saya, serta untuk doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk kebahagiaan saya.
1. Almamater, jajaran Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang yang telah menjadi rumah untuk saya mencari ilmu.
2. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Rochmani, SH.,M.Hum yang selalu mendukung saya supaya tetap terus berjalan dan bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Syifa Mashudi yang menemani saya dalam berproses, selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta doa terbaik untuk saya.
4. Sahabat-sahabatku Indah, Ragil, Dania, Norma yang terus mendukung saya dalam hal apapun termasuk dalam skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang sudah berproses bersama saya dari awal perkuliahan hingga akhir.
6. Tidak lupa untuk diri saya sendiri, yang sudah berusaha keras berdiri dan bertahan hingga saat ini.

ABSTRAK

Perniagaan satwa dilindungi sudah bukan lagi menjadi suatu hal yang baru, bahkan saat ini banyak satwa-satwa dilindungi yang diperjualbelikan secara bebas dan terang-terangan, penyebabnya bisa jadi karena kurang seriusnya para aparat penegak hukum memberantas perkara ini ataupun karena kurangnya pengetahuan masyarakat perihal jenis-jenis satwa. Undang-undang yang memuat perkara ini memang sudah ada sejak tahun 1990, namun pada kenyataannya masih banyak kasus serupa yang terjadi dikarenakan lemahnya sanksi pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi, sehingga tidak mudah memberikan efek jera bagi para pelaku. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa BKSDA terkesan sulit dalam membawa perkara perniagaan satwa dilindungi ke pengadilan. (2) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990. (3) Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990. Adapun tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk menjelaskan alasan BKSDA yang terkesan sulit membawa perkara perniagaan satwa dilindungi untuk diproses ke pengadilan. (2) Untuk menjelaskan apakah sanksi pidana yang didapat oleh pelaku perniagaan satwa langka dilindungi sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normative, spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, sumber data sekunder, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bukanlah wewenang BKSDA untuk membawa perkara perniagaan satwa dilindungi untuk diproses ke pengadilan. (2) Penerapan sanksi pidana dilakukan terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi dalam Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN.Bnr. melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi dalam Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN.Bnr, adalah menggunakan Pertimbangan Yudiris dan Non-Yuridis. (3) Hambatan dapat terjadi dari berbagai faktor diantaranya faktor teknologi, wilayah, sarana dan prasarana, serta dukungan dari masyarakat. Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa pemberantasan kasus perniagaan satwa dilindungi seharusnya menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat memutus penyebaran kasus perniagaan satwa dilindungi karena meskipun sudah ada undang-undang yang isinya memuat tentang larangan serta sanksi yang akan diterima oleh para pelaku, pada kenyataannya masih banyak yang menganggap sepele perkara perniagaan satwa dilindungi.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Satwa Dilindungi*

ABSTRACT

The business of protected animals is no longer a new thing, even today many protected animals are traded freely and blatantly, the cause could be because of the lack of seriousness of law enforcement officials eradicate this matter or because of the lack of public knowledge about the types of animals. The law containing this case has been in place since 1990, but in reality there are still many similar cases that occur due to weak criminal sanctions against protected animal businesses, so it is not easy to provide a deterrent effect for the perpetrators. The problems examined in this study is (1) Why BKSDA seems difficult in bringing protected animal business cases to court. (2) How the enforcement of criminal law against wildlife business actors is protected in accordance with Law No. 5 of 1990. (3) What is the obstacle in the enforcement of criminal law accordance with Law No. 5 of 1990. The purpose of the study is (1) To explain why BKSDA seems difficult to bring protected animal business cases to be processed to court. (2) To explain whether the criminal sanctions obtained by the perpetrators of illegal wildlife business is in accordance with Law No. 5 of 1990. The method used in this study is normative juridical legal research method, analytical descriptive research specification, secondary data source, the data obtained is analyzed qualitatively. The results showed that (1) It is not the authority of BKSDA to bring protected animal business cases for processing in court. (2) The application of criminal sanctions shall be carried out against protected wildlife business actors in Decision No. 13/Pid.sus/2020/PN.Bnr. in violation of Article 21 paragraph (2) letter a jo. Article 4 paragraph (2) of Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, then the basis of consideration of judges in the application of criminal sanctions against protected wildlife business actors in Decision No. 13/Pi.Sus/2020/PN.Bnr, is to use Judicial and Non-Judicial Considerations. (3) Obstacles may occur from various factor including technological factors, regions, facilities and infrastructure, as well as support from the community. From this study can be concluded that the eradication of protected animal business cases should be a joint responsibility of all elements of society, in stopping the spread of protected animal business cases because although there are already laws containing prohibitions and sanctions that will be received by the perpetrators, in fact there are still many who take the case of protected animal business lightly.

Keywords: *Law Enforcement, Protected Animals*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwr.wb

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan

judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU**

PERNIAGAAN SATWA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NO. 5

TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

Skripsi ini merupakan syarat yang mutlak dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan program studi strata satu guna memperoleh gelar S.H Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.

Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Safik Faozi, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang
2. Bapak Dr. Rochmani, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang
3. Bapak Dr. Rochmani, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penulisan skripsi
4. Bapak Heru Sunarko, S.Hut, selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Semarang, Jawa Tengah yang telah bersedia penulis wawancara dan mengizinkan penulis untuk melakukan riset
5. Seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan
6. Teristimewa kedua Orang tuaku Mamah Sri Marleninah yang selalu memanjatkan doa untuk penulis, memberi semangat dan dukungan, menjadi teman penulis mencurahkan isi hati, Papah Sutrisno yang telah berjuang bersama Mamah membiayai dan selalu memberikan support dalam bentuk apapun
7. Teristimewa kekasih saya Syifa Mashudi yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa, serta menemani penulis sepanjang perjalanan penulisan skripsi, juga selalu ada dalam keadaan suka duka, tangis, keluh kesah, juga tawa bahagia

8. Teristimewa sahabat-sahabatku Indah, Ragil, Dania, Norma yang selalu saling memberi support kepada satu sama lain, meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah penulis
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang
10. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasannya pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun demikian penulis telah berusaha mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktu untuk dapat membuat skripsi ini mendekati kekurangan pada kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Semarang, 22 Februari 2021

Penulis

Rezyana Pinkan S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	3
1.3 Perumusan Masalah	4
1.4 Kerangka Pemikiran.....	5
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum	9
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	9
2.1.2 Penegrtian Tindak Pidana.....	10
2.1.3 Penegakan Hukum Pidana.....	11
2.1.4 Pihak Terkait Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	13
2.1.5 Pengertian Satwa Dilindungi.....	14
2.2 Tinjauan Khusus	16
2.2.1 Perniagaan Satwa Dilindungi	16
2.2.2 Jenis Sanksi Pidana.....	18
2.2.3 Penerapan Sanksi Pidana.....	18
2.2.4 Prosedur Memelihara atau Memperniagakan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	22
3.2 Spesifikasi Penelitian	22
3.3 Sumber Data.....	23

3.4 Metode Pengumpulan Data.....	23
3.5 Metode Penyajian Data	23
3.6 Metode Analisis Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Hasil Penelitian	25
4.1.1 Peran BKSDA dalam penegakan hukum pidana terhadap perkara perniagaan satwa dilindungi	25
4.1.2 Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.....	32
4.1.3 Hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.....	38
4.2 Analisis Data	42
4.2.1 Peran BKSDA dalam penegakan hukum pidana terhadap perkara perniagaan satwa dilindungi	42
4.2.2 Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.....	49
4.2.3 Hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.....	50

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis-Jenis Satwa Dilindungi	15
Tabel 2. Penanganan Kasus Satwa Liar	29
Tabel 3. Analisis Perbandingan Kewenangan.....	42